

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dengan status sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, mempunyai potensi ekonomi yang luas dan sangat beragam, baik dari sisi pasar domestik maupun sumber daya manusianya. Sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tercermin dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkelanjutan indikator yang menunjukkan daya tahan dan kapasitas perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global, ekspansi sektor industri dan jasa, serta membaiknya indikator makroekonomi lainnya. Peningkatan tersebut pada gilirannya telah mendorong kenaikan pendapatan per kapita dan menurunnya angka kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia (Yunita & Sentosa, 2019).

Meskipun demikian, prestasi perekonomian tersebut tidak lantas menghilangkan tantangan struktural yang telah lama menghantui proses pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah pengangguran khususnya pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka mencerminkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap langsung oleh pasar tenaga kerja. Kondisi ini tidak hanya berarti kehilangan pendapatan bagi individu, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan (Rianti & Jannah, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai

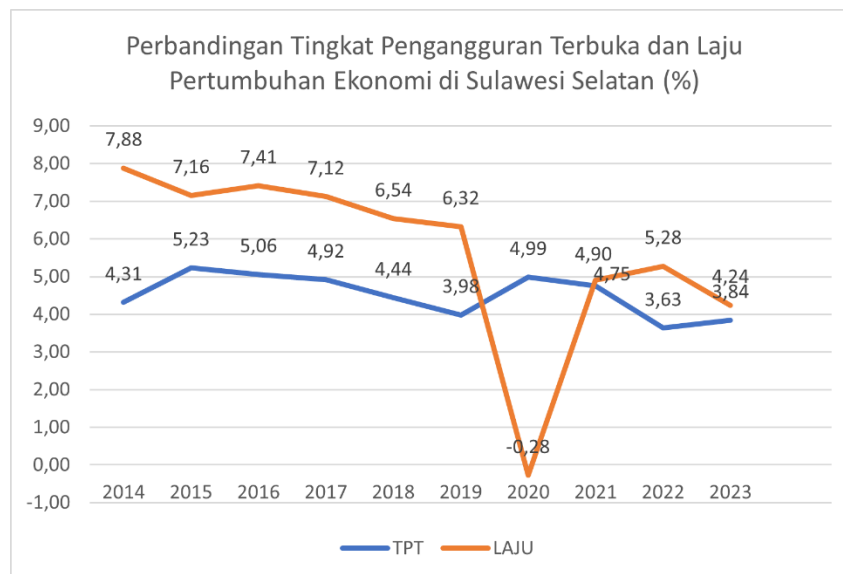
keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan tidak hanya menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa, tetapi juga mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, memiliki posisi strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional melalui kontribusinya terhadap peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai peningkatan produksi per kapita dalam jangka panjang. Peningkatan tersebut menjadi cerminan nyata dari kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output yang lebih besar secara berkesinambungan. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya alternatif konsumsi barang dan jasa yang tersedia, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak hanya berperan sebagai indikator makro, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yuniarti et al., 2020).

Secara konseptual, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, serta jumlah penduduk telah menjadi fokus utama dalam literatur ekonomi kontemporer. Pertumbuhan ekonomi diyakini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, sesuai dengan Hukum Okun, yang menyatakan adanya korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di mana percepatan laju pertumbuhan ekonomi secara teori diikuti dengan penurunan tingkat

pengangguran (Jonathan, 2009). Hukum Okun ini secara empiris membuktikan bahwa output ekonomi yang lebih tinggi dapat menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi.

Selain itu, PMDN dianggap sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena investasi domestik dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja (Siti & Rosyadi, 2022). Dengan melakukan pembentukan modal domestik, sektor-sektor ekonomi diharapkan berkembang lebih produktif dan inklusif, sehingga investasi domestik tidak hanya mendorong output, tetapi juga mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.



**Gambar 1.1** Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2023

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain

penanaman modal dalam negeri (PMDN), tingkat inflasi, rata-rata lama sekolah, serta jumlah penduduk. Pada tahun 2023, realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp16,451 triliun, di mana kontribusi PMDN mencapai Rp11,468 triliun atau sekitar 70 persen dari total investasi (DPMPTSP,2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa PMDN memiliki peranan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat struktur perekonomian Sulawesi Selatan.

Faktor sosial seperti kualitas pendidikan juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 8,80 tahun, meningkat dari 7,96 tahun pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas sumber daya manusia, yang berpotensi mendorong produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Sementara itu, jumlah penduduk yang terus meningkat juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 9,49 juta jiwa. Namun kondisi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fenomena yang berbeda.

Selama periode 2014 hingga 2019, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cukup tinggi, berkisar antara 6% hingga 7% per tahun. Tren positif ini disertai dengan penurunan bertahap pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang pada awalnya sempat berada di atas 5% namun menurun menjadi 3,98% pada tahun 2019. Khususnya pada tahun 2017 hingga 2019, penurunan TPT cukup signifikan sekitar 0,48 hingga 0,46 poin persen per tahun

mencerminkan kondisi ideal dalam teori ekonomi makro bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya mendorong penciptaan lapangan kerja.

Namun, situasi tersebut berubah drastis pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan tercatat -0,28%, dan TPT melonjak ke angka 4,99%. Guncangan ini menunjukkan tingginya sensitivitas pasar tenaga kerja terhadap gangguan ekonomi. Pada grafik terlihat bahwa pemulihan ekonomi mulai terjadi pada 2021 dan berlanjut hingga 2023, dengan pertumbuhan kembali ke kisaran 4% hingga 5%. Meskipun demikian, TPT tidak serta-merta kembali ke tren penurunan seperti sebelum pandemi, menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum berjalan seiring dengan pemulihan tenaga kerja.

Kondisi sepanjang satu dekade terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Sulawesi Selatan tidak selalu sejalan. Jika pada 2017–2019 hubungan tersebut berjalan ideal, maka pasca-2020 justru menunjukkan ketidakseimbangan. Pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih belum diikuti oleh penurunan TPT secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, seperti struktur sektor ekonomi, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas investasi.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana hubungan variabel ekonomi makro seperti inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendasari ketidakseimbangan tersebut serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat pengaruh langsung masing-masing variabel, tetapi juga berupaya menganalisis hubungan tidak langsung melalui variabel pengangguran terbuka sebagai variabel mediasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh indikator makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Rata-rata Lama Sekolah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2014-2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka maupun tidak langsung di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka maupun tidak di Provinsi Sulawesi Selatan?

4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran di Terbuka provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang dampak inflasi, penanaman modal dalam

negeri, rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk melalui pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi langsung sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi Keynesian menekankan peran krusial permintaan agregat dalam mendorong output dan pertumbuhan nasional. Berbeda dengan pandangan ekonomi klasik yang fokus pada sisi penawaran (potensial output), Keynes berpendapat bahwa kegiatan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat (permintaan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri). Keynes berpendapat bahwa perekonomian bahwa perekonomian tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mencapai kapasitas penuh tenaga kerja (full employment) dengan sendirinya, tanpa permintaan agregat yang cukup, perekonomian bisa terjebak pada output di bawah potensinya dengan pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu dalam teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi dipandang dapat tertahan akibat kekurangan permintaan efektif. Solusinya, intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal atau moneter ekspansif diperlukan untuk mendorong permintaan agregat guna mencapai tingkat output penuh dan meningkatkan pertumbuhan. (Anggoro, 2015)

Dalam kerangka Keynesian, perusahaan akan menaikkan produksi dan menyerap tenaga kerja jika dapat mengantisipasi hasil produksi akan terjual (ada permintaan). Dengan demikian, permintaan yang mendorong output karena ketika permintaan agregat meningkat, produsen merespons dengan meningkatkan produksi hingga tercapai kapasitas penuh. Selama masih terdapat pengangguran,

penambahan permintaan agregat cenderung meningkatkan output riil dan kesempatan kerja daripada harga, karena harga dan upah bersifat kaku dalam jangka pendek.

Teori Keynesian juga menekankan pentingnya efek multiplier: setiap kenaikan investasi atau pengeluaran awal akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar dari nilai pengeluaran tersebut karena terjadi konsumsi berulang oleh penerima pendapatan berikutnya. Misalnya, peningkatan investasi atau belanja pemerintah tidak hanya menambah permintaan secara langsung melainkan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong konsumsi tambahan mendorong output nasional meningkat sehingga efeknya berantai memperbesar pertumbuhan. Pandangan Keynesian menegaskan bahwa permintaan agregat memegang kendali dalam jangka pendek pertumbuhan output, sehingga kebijakan yang merangsang komponen-komponen permintaan (konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor neto) akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, setidaknya hingga kapasitas penuh tercapai. Namun, ketika perekonomian mendekati kapasitas penuh, karakter hubungan antara permintaan, output, dan harga mulai berubah yang tercermin dalam dinamika inflasi.

### **2.1.2 Teori Pengangguran Terbuka**

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan sebagai penyempurnaan teori klasik, dengan model terkenal yang diperkenalkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan (1956). Model Solow-Swan memasukkan peran akumulasi modal fisik, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. (Malau et al, 2024)

Model ini mengasumsikan fungsi produksi berjenis Cobb-Douglas yang berskala hasil konstan, di mana output (Y) ditentukan oleh kombinasi modal (K), tenaga kerja (L), dan faktor produktivitas total atau Total Factor Productivity (TFP). Solow menunjukkan bahwa melalui interaksi pertumbuhan populasi (tenaga kerja), penambahan stok modal, dan kemajuan teknologi, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran terbuka sehingga perekonomian akan bergerak menuju keseimbangan jangka panjang (steady-state). Dalam teori pertumbuhan neoklasik, peningkatan output ekonomi dijelaskan sebagai hasil dari tiga hal utama, yaitu penggunaan modal, tenaga kerja, dan suatu komponen tambahan yang disebut Total Factor Productivity (TFP). Komponen TFP ini merupakan bagian dari pertumbuhan yang tidak berasal langsung dari modal atau tenaga kerja, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemajuan teknologi, tingkat pendidikan penduduk (sumber daya manusia), serta efektivitas lembaga dan sistem ekonomi dalam menjalankan fungsinya. (Radhyanti et al, 2023)

Solow menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi per kapita terutama ditentukan oleh peningkatan produktivitas, seperti melalui kemajuan teknologi. Hal ini terjadi karena penambahan modal dan tenaga kerja saja tidak lagi memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ketika manfaat dari penambahan tersebut mulai berkurang. Artinya, peningkatan output per pekerja akhirnya sangat bergantung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja daripada sekadar penambahan jumlah tenaga kerja atau modal semata. Dengan kata lain, model neoklasik menegaskan pentingnya tenaga kerja yang efektif yaitu tenaga kerja terlatih dan terserap penuh dan kemajuan teknologi sebagai motor pertumbuhan ekonomi

jangka panjang (Radhyanti et al, 2023).

Dalam kerangka teori ini, pengangguran terbuka menunjukkan bahwa tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketika banyak orang yang siap bekerja tidak mendapatkan pekerjaan, maka jumlah barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh perekonomian menjadi lebih rendah dari kemampuannya. Oleh karena itu, pengangguran terbuka dapat dianggap sebagai penghubung antara faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, investasi dalam negeri, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika investasi meningkat atau kualitas pendidikan membaik, hal ini bisa membantu mengurangi pengangguran terbuka. Selanjutnya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka produksi nasional juga akan meningkat karena faktor tenaga kerja digunakan secara lebih optimal.

### **2.1.3 Teori Inflasi**

Menurut Milton Friedman, inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan output riil. Friedman menegaskan bahwa *“inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”*, yang berarti bahwa inflasi pada dasarnya disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak terkendali. Dalam kerangka teori monetaris, inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena menimbulkan ketidakpastian ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta melemahkan minat investasi. Ketidakstabilan harga membuat pelaku ekonomi sulit memprediksi keuntungan, sehingga kegiatan produksi dan investasi menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan

terhambat (Auliana,2025).

Teori moneter Friedman menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan merusak efisiensi pasar dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Lingkungan harga yang stabil dianggap kondusif bagi aktivitas ekonomi, sedangkan inflasi yang tidak mengendalikan mengganggu fungsi harga sebagai sinyal ekonomi. Friedman (1968) berpendapat bahwa stabilitas moneter adalah kunci, inflasi yang moderat dan stabil menciptakan iklim yang lebih pasti bagi pelaku ekonomi, sehingga mendorong investasi dan konsumsi yang sehat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi cenderung diikuti oleh kenaikan nominal suku bunga sebagai respon kebijakan moneter, yang dapat menekan investasi dan output jangka pendek. Lebih penting lagi, inflasi seringkali mengikis daya beli masyarakat dan mencapai keputusan konsumsi maupun produksi, sehingga menghambat pertumbuhan output agregat.

Pandangan Friedman memberikan kerangka bahwa pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter merupakan prasyarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam konteks penelitian, teori moneterisme Friedman mempertahankan argumen bahwa variabel moneter. Inflasi yang terkendali berperan positif bagi perekonomian, sedangkan inflasi tinggi cenderung menghambat pertumbuhan melalui mekanisme penurunan efisiensi, penurunan, serta gangguan investasi dan konsumsi.. Teori Friedman tentang inflasi sebagai fenomena moneter dengan jelas menjelaskan mengapa hal itu terjadi: karena inflasi bersumber dari eksep pertumbuhan uang, solusinya ada pada disiplin moneter. Dengan demikian, kerangka moneter ini memberikan landasan teoritis dalam memahami hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diobservasi dalam data dan studi empiris terkini.

Dalam menjelaskan hubungan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Friedman mengkritik Kurva Phillips klasik yang sebelumnya menyatakan adanya hubungan trade-off antara inflasi dan kemiskinan. Kurva Phillips klasik memberikan asumsi bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga output perekonomian meningkat. Namun Friedman menyatakan bahwa hubungan tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek karena masyarakat akan membentuk ekspektasi inflasi. Ketika ekspektasi inflasi meningkat, pekerja dan perusahaan akan menyesuaikan upah dan harga sehingga dampak ekspansi moneter terhadap output menjadi hilang (Friedman,1968).

Friedman kemudian memperkenalkan konsep ekspektasi inflasi serta gagasan tentang tingkat pengangguran alamiah yang menjadi dasar munculnya Kurva Phillips jangka panjang (Long-Run Phillips Curve ). Dalam jangka panjang, kurva tersebut bersifat vertikal pada tingkat kemiskinan alami, yang berarti tidak ada trade-off permanen antara inflasi dan kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan inflasi yang terus-menerus tidak akan meningkatkan output riil ataupun pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum (Friedman, 1977).

Teori Friedman memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, peningkatan perputaran uang dapat mendorong output dan pertumbuhan sementara, namun dalam jangka panjang kebijakan tersebut hanya menghasilkan inflasi yang lebih tinggi tanpa meningkatkan kapasitas produksi riil. Oleh karena itu, Friedman menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui inflasi, melainkan harus berasal dari faktor-

faktor fundamental seperti produktivitas, investasi, dan inovasi. Stabilitas moneter dan pengendalian inflasi menjadi syarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sehat (Nelson, 2019)

#### **2.1.4 Teori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau individu dari dalam negeri dengan tujuan membangun, mengembangkan, atau menjalankan bisnis di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan peluang usaha di berbagai bidang, perorangan, badan usaha, dan institusi dapat menggunakan sumber daya modal domestik (Djamin, 2020).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod–Domar, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai bentuk investasi domestik meningkatkan pengeluaran agregat, yang mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Peningkatan produksi tersebut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, melalui sisi permintaan, PMDN berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja (Aprilia et al, 2024).

Dalam hal pelaksanaan investasi di Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur berbagai peraturan penting. Penanaman modal harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta bahwa investor dalam negeri dan asing dilayani dengan cara

yang sama. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing nasional, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penanam modal berhak atas kepastian hukum, informasi, layanan, dan keuntungan seperti bea masuk dan insentif pajak. Sebaliknya, mereka harus mematuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mengutamakan tenaga kerja lokal, menjaga lingkungan, dan secara teratur melaporkan investasi. Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 3 ayat 2 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. Menciptakan lapangan kerja; c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sinaga, 2023).

#### **2.1.5 Teori Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang ditempuh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini umumnya diukur pada individu yang telah berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut dianggap telah menyelesaikan pendidikan formal atau sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi. (BPS, 2024; Yuliani, 2023; Disdik Jabar, 2023).

Menurut teori Human Capital yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, pendidikan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Schultz menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas produktif individu, sedangkan Becker menegaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas. Rata-rata lama sekolah sebagai indikator tingkat pendidikan penduduk mencerminkan besarnya investasi pendidikan dalam suatu wilayah. Peningkatan rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, sehingga meningkatkan produktivitas, memperbesar output perekonomian, menurunkan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran.

Menurut teori Human Capital yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, pendidikan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Schultz menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas produktif individu, sedangkan Becker menegaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas. Rata-rata lama sekolah sebagai indikator tingkat pendidikan penduduk mencerminkan besarnya investasi pendidikan dalam suatu wilayah. Peningkatan rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, sehingga meningkatkan produktivitas, memperbesar output perekonomian, menurunkan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran.

Pendidikan merupakan bentuk investasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan penduduk dan menunjukkan besarnya investasi pendidikan dalam suatu wilayah.

Peningkatan rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, sehingga memperbesar peluang kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Penurunan pengangguran tersebut selanjutnya mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi (Johar et al, 2023).

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan kondisi belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Melalui pendidikan, individu diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang memegang peran penting dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Dengan adanya pendidikan, produktivitas suatu negara dapat meningkat karena masyarakat memperoleh kecakapan dan keterampilan yang lebih baik. Keterampilan tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menghasilkan output yang lebih besar sekaligus memperbaiki kondisi perekonomian. (Todaro,2006).

Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting bagi investor asing dalam menilai kualitas serta nilai sumber daya manusia yang akan dijadikan tenaga kerja. Selain itu, RLS juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam menggambarkan daya beli masyarakat pada suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan individu sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang menempuh pendidikan formal.

Seseorang dengan jenjang pendidikan yang lebih panjang memang cenderung memulai karier pada usia yang lebih tua, tetapi pendapatannya biasanya lebih tinggi dibandingkan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah meskipun sudah memasuki dunia kerja lebih awal (Yuliani, 2023; Ramita dkk., 2022).

#### **2.1.6 Teori Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah seluruh individu yang menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang secara resmi didefinisikan sebagai mereka yang berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun atau bermaksud untuk menetap (BPS, 2025). Dalam perspektif ekonomi pembangunan, jumlah penduduk tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai faktor produksi utama yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap pasokan tenaga kerja.

Menurut Adam Smith (1776) dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pertumbuhan jumlah penduduk berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar dan pembagian kerja. Adam Smith menyatakan bahwa “The division of labour is limited by the extent of the market”. Artinya, Pertumbuhan jumlah penduduk memperluas pasar (extent of the market) dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi permintaan agregat dalam perekonomian. Peningkatan permintaan tersebut mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, dan khususnya Sulawesi Selatan, pertumbuhan

jumlah penduduk menuntut adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih besar melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tanpa adanya keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja, maka risiko meningkatnya pengangguran terbuka akan semakin besar, sehingga tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi sulit tercapai.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi adalah fenomena moneter yang pada dasarnya disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output riil dalam jangka panjang. Dalam kerangka monetaris, Friedman menolak gagasan bahwa terdapat trade-off permanen antara inflasi dan pengangguran seperti yang diyakini dalam kurva Phillips jangka pendek. Menurut Friedman, hubungan tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek karena masyarakat belum menyesuaikan ekspektasinya terhadap inflasi. Dalam jangka panjang, ekspektasi akan menyesuaikan dan tingkat pengangguran akan kembali ke tingkat alami (natural rate of unemployment), sementara inflasi tetap tinggi apabila tidak dikendalikan.

Namun, dalam konteks perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia, hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak selalu sederhana. Ketika inflasi berada pada tingkat moderat, ia dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang tinggi dan mendorong pertumbuhan. Akan tetapi, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengganggu kestabilan harga dan daya beli, yang pada akhirnya berdampak negatif

terhadap permintaan agregat dan menciptakan ketidakpastian dalam investasi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi tersebut, pengangguran terbuka dapat muncul sebagai konsekuensi dari inflasi yang tidak terkendali, karena perusahaan menahan ekspansi atau mengurangi tenaga kerja akibat tekanan biaya.

Sebaliknya, dalam tingkat inflasi yang terkendali dan stabil, kondisi ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi sektor usaha untuk tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran terbuka akan menurun, dan penurunan ini akan berkontribusi pada peningkatan output nasional, karena semakin banyak tenaga kerja yang digunakan secara produktif dalam proses produksi. Dalam skenario ini, pengangguran terbuka dapat berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, inflasi yang terkendali tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan, tetapi melalui peningkatan kesempatan kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan output.

Friedman sendiri mengakui bahwa kestabilan moneter merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam kerangka teorinya, inflasi yang rendah dan stabil akan mendukung kondisi ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga pengangguran dapat ditekan, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran pengangguran terbuka dalam konteks ini bukan hanya sebagai indikator ketidakefisienan pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai penghubung penting dalam memahami bagaimana stabilitas harga berdampak pada kinerja makroekonomi secara keseluruhan.

### **2.2.2 Hubungan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Investasi adalah komponen kunci dalam teori pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merepresentasikan investasi yang dilakukan oleh investor domestik di dalam negeri. Investasi PMDN umumnya mencakup pembangunan pabrik, infrastruktur, pengembangan usaha baru, dan ekspansi usaha lokal yang dananya berasal dari dalam negeri. Secara teoritis, peningkatan investasi domestik meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta diharapkan menciptakan lapangan kerja baru sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Ketika investasi tumbuh, permintaan tenaga kerja untuk pembangunan proyek dan operasional usaha juga meningkat, yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan Penanaman modal dalam negeri yang menciptakan lapangan kerja akan berdampak langsung pada penurunan tingkat pengangguran. Semakin banyak proyek dan usaha yang didanai PMDN, semakin luas penyerapan tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran berkurang. Penelitian empiris di Sumatera Barat menemukan bahwa pertumbuhan investasi PMDN berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka (Ridwan & Sumarni, 2024).

Meskipun teori menggaris bawahi peran positif investasi, pengaruh empiris PMDN dapat bervariasi lintas daerah. Trisniani & Sugianto (2025) dalam studi di Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa investasi PMDN secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut[4].

Padahal, seharusnya PMDN dapat mendorong modal untuk pembangunan ekonomi. Ketiadaan pengaruh ini mungkin dipicu oleh proporsi PMDN yang relatif kecil atau efektivitas investasi yang rendah (misalnya proyek investasi tidak berjalan optimal). Sebaliknya, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dilaporkan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada konteks struktural dan kualitas investasi tersebut.

Di Sulawesi Selatan, realisasi investasi PMDN terus meningkat selama 2014–2023 (sumber: BKPM) sehingga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain dampak terhadap output, investasi berperan dalam pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Investasi pada sektor riil misalnya industri pengolahan, konstruksi, pertanian modern, cenderung menyerap banyak tenaga kerja, sehingga naik turunnya investasi dapat memengaruhi tingkat pengangguran terbuka suatu daerah. Oleh karena itu, analisis pengaruh PMDN perlu mencakup baik efek langsung ke pertumbuhan ekonomi maupun efek tidak langsung melalui pengurangan tingkat pengangguran.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan berbagai penelitian, peningkatan PMDN terbukti dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena investasi domestik mendorong kegiatan produksi yang kemudian menciptakan peluang kerja baru. Dengan tersedianya lapangan kerja tambahan, jumlah pengangguran pun mengalami penurunan. Selain itu, PMDN tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan permintaan, tetapi juga memperluas kapasitas

produksi. Peningkatan kapasitas ini berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang. Dalam perspektif teori Harrod-Domar, investasi berperan tidak hanya dalam mendorong peningkatan permintaan, tetapi juga dalam meningkatkan aktivitas produksi (Nadia,2023).

### **2.2.3 Hubungan Rata-rata lama sekolah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**

Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, sehingga pendidikan dipandang sebagai investasi SDM yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Secara teoritis, peningkatan rata-rata lama sekolah di suatu daerah akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah tersebut. Tenaga kerja terdidik cenderung lebih produktif, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, dan lebih inovatif. Dampaknya, produktivitas marginal tenaga kerja meningkat sehingga mendorong pertumbuhan PDRB. Selain itu, tenaga kerja dengan pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan kerja yang lebih baik karena keahlian yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi diharapkan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Rata-rata lama sekolah berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat

pengangguran terbuka, artinya semakin tinggi rata-rata pendidikan penduduk, semakin rendah TPT. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi terbukti memediasi sebagian hubungan antara pendidikan dan pengangguran tersebut. Ini berarti pendidikan yang lebih baik tidak hanya langsung mengurangi pengangguran (melalui peningkatan keterampilan kerja), tetapi juga tidak langsung menurunkan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hasil dari kualitas SDM yang lebih baik (Johar et al, 2023).

#### **2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Jumlah penduduk merupakan faktor demografis yang berpengaruh pada skala ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat memperluas pasar domestik dan menyediakan lebih banyak tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, seharusnya suatu daerah mampu menghasilkan produk dalam jumlah banyak serta memiliki konsumen dalam jumlah besar, sehingga kegiatan ekonomi terus berkembang. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan mendorong peningkatan spesialisasi dalam perekonomian, yang secara teori akan meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan konsep bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif yang tinggi dapat menjadi motor pertumbuhan apabila terserap di pasar kerja.

Namun, dampak jumlah penduduk terhadap perekonomian tidak serta merta positif. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, maka pengangguran akan meningkat akibat kelebihan pasokan tenaga kerja. Penduduk yang besar juga memerlukan penyediaan pangan, perumahan, dan layanan publik yang cukup; bila tidak terpenuhi, dapat muncul tekanan sosial ekonomi. Semakin

besar jumlah penduduk (angkatan kerja) tanpa peningkatan kesempatan kerja yang sepadan akan menaikkan angka pengangguran (Syafirah et al, 2025). Semakin besar jumlah penduduk (angkatan kerja) tanpa peningkatan kesempatan kerja yang sepadan akan menaikkan angka pengangguran. Sebaliknya, daerah dengan penduduk besar tetapi ekonominya mampu menyerap banyak tenaga kerja akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat seiring optimalnya pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja.

### **2.2.5 Hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka merupakan tidak optimalnya pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja. Ketika sebagian tenaga kerja tidak terserap dalam proses produksi, maka kontribusi tenaga kerja terhadap output akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi tertahan. Oleh karena itu, pengangguran terbuka dapat diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh faktor-faktor lain, seperti investasi domestik (modal), tingkat pendidikan (human capital), inflasi, dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan investasi atau kualitas pendidikan akan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga menurunkan pengangguran terbuka. Penurunan pengangguran tersebut kemudian mendorong peningkatan output nasional melalui pemanfaatan tenaga kerja secara lebih efisien.

Pengangguran terbuka bukan hanya akibat dari pertumbuhan yang lemah, melainkan juga saluran penting yang menentukan seberapa besar efek faktor-faktor ekonomi dapat berkontribusi pada pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pandangan

neoklasik bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada penambahan input, tetapi juga pada efektivitas alokasinya. Ketika tenaga kerja berkualitas tersedia dan terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi produktif, maka pertumbuhan akan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

### **2.3 Studi Empiris**

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yenny & Anwar (2020), mereka meneliti Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Lhokseumawe tahun 2001-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Lhokseumawe. Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penduduk. Hal ini dikaitkan dengan kurang produktifnya penduduk dan besarnya konsumsi masyarakat yang justru bocor ke luar daerah, sehingga populasi besar tidak mendorong pertumbuhan setempat. Temuan ini konsisten dengan hipotesis bahwa tanpa kualitas SDM dan peluang kerja, populasi besar bisa menjadi liabilitas ekonomi.

Johar et al. (2023) melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui hubungan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan mediasi laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten 2012-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis PATH, menggunakan data sekunder di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif signifikan antara rata-rata lama sekolah dan

pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial hubungan tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan penduduk secara langsung maupun tidak langsung (melalui peningkatan pertumbuhan) mampu menurunkan pengangguran.

Studi tambahan yang dilakukan oleh Trisniani & Sugianto (2025) melihat bagaimana pengaruh PMA, PMDN, PAD, dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan data panel. Hasil penelitian PMA (Penanaman Modal Asing) dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PMDN dan TPT tidak berpengaruh signifikan. Penulis mencatat bahwa hasil ini agak mengejutkan karena secara teori PMDN seharusnya mendorong pertumbuhan dan tingkat pengangguran tinggi seharusnya menghambat pertumbuhan. Studi ini menyarankan pentingnya meningkatkan investasi dan efektivitasnya serta mengurangi pengangguran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian tertulis oleh Syafirah et al (2025) bertujuan untuk mempelajari pengaruh jumlah penduduk, Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi terhadap tingkat pengangguran di kota makassar tahun 2017-2021. Data sekunder dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, dan jurnal ilmiah terkait, digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan Dengan regresi linear, hasilnya menunjukkan jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh signifikan. Implikasinya, pertumbuhan penduduk dan kenaikan harga di kota besar seperti Makassar menambah tekanan pengangguran, sementara pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup inklusif menyerap tenaga kerja. Studi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang memperhatikan dinamika demografi dan stabilitas harga dalam upaya menurunkan pengangguran perkotaan.

Penelitian yang dilakukan Al Wasi et al. (2025) yang berjudul Pengaruh Kemiskinan dan TPT terhadap Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 2014-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi regresi menunjukkan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. Hubungan positif yang tidak lazim ini diduga karena adanya efek endogenitas atau faktor luar biasa seperti pasca pandemi di mana peningkatan partisipasi angkatan kerja sementara menaikkan TPT bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Studi ini menjadi menarik karena berlawanan dengan ekspektasi teori, sehingga peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang mampu menangkap hubungan simultan antara pertumbuhan dan pengangguran seperti model VAR atau SEM untuk menguji fenomena tersebut.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, penulis pada penelitian ini membuat kerangka konseptual dengan menggunakan beberapa variabel independen: Inflasi ( $X_1$ ), Penanaman Modal dalam Negeri ( $X_2$ ), Rata-rata lama sekolah ( $X_3$ ) dan Jumlah Penduduk ( $X_4$ ) melalui Pengangguran Terbuka ( $Y_1$ ) terhadap